
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG

Suherman

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Aug 8, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 16, 2024

Keywords:

Public Policy

Public Policy Implementation

*Regional Disaster Counseling
Program*

Regional Disaster

ABSTRACT

This research aims to find out how the Disaster Education Program is implemented in order to increase public awareness in Sumedang Regency, what factors hinder it and how to overcome the obstacles. The research method used in the research is qualitative methodology. With research informants, namely five informants. The data collection techniques used were literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. Meanwhile, the processing procedures in this research are data reduction, data presentation, data verification and triangulation. Based on the research results, it was concluded that the Disaster Outreach Program in the Context of Developing the Basic Capabilities of Poor Communities in Sumedang Regency can be said to be quite good, but there are still several obstacles. This occurs because of obstacles such as the lack of public understanding of the disaster education program, internal human resources are still small, the budget is limited, facilities and infrastructure are still lacking and there is a lack of expert staff. At the end of writing this research, the researcher provides suggestions, namely that BPBD is more active in conducting outreach, counseling and simulations to the community.



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Suherman

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: Shermansuhe@gmail.com

1. INTRODUCTION

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007).

Dalam buku resiko bencana Indonesia 1 (2023) yang diterbitkan BNPB mengidentifikasi kabupaten Sumedang memiliki ancaman bahaya bencana alam diantaranya tanah longsor kekeringan, cuaca ekstrem, banjir bandang, likuefaksi, dan gempa bumi.

Dengan memiliki luas wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Yang merupakan daerah berbukitan dan pergunungan dengan ketinggian tempat antara 25m-1.667m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kabupaten Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara brupa daerah rendah.

Sehingga kabupaten Sumedang termasuk dalam 8 kabupaten rawan bencana di provinsi Jawa Barat dengan mencatat sepanjang tahun 2022 total terjadinya bencana di wilayah kabupaten Sumedang terjadi 140 bencana. Bencana yang terjadi baik yang berskala kecil, sedang, hingga besar.

Tabel 1. Data Kebencanaan Tahun 2022

No	Nama Bencana	Total Kejadian	Keterangan
1	Bencana Longsor	74	13 Fasilitas Umum Rusak
2	Bencana Banjir	26	2 Orang Meninggal Dunia
3	Pohon Tumbang	20	Tidak ada korban jiwa dan kerusakan
4	Pergerakan Tanah	10	114 KK Mengungsi
5	Banjir Bandang	6	22 Insfrakstruktur Rusak
7	Putin Beliung	3	5 Orang Meninggal Dunia
8	Kebakaran Hutan	1	Tidak ada korban jiwa dan kerusakan

Sumber BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Dari 26 kecamatan di kabupaten Sumedang, kecamatan sumedang selatan yang paling banyak terjadi bencana selama 2022, yakni 35 kejadian, sedangkan tomo, ujung jayaa, surian, dan tanjungmedar menjadi yang paling sedikit, masing-masing 1 kejadian. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program 82asyarakat2,perlindungan, 82asyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak 82asyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum,pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Badan penanggulangan Bencana Daerah bertugas memberikan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulungan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tenaggap darurat, rehabilitas, dan rekontruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bentuk kesiapsiagaan BPBD kabupaten Sumedang yaitu dengan melakukan pelatihan pasca terjadi bencana seperti apa yang harus dilakukan, sehingga masyarakat di kabupaten Sumedang memahami tentang bahaya yang terjadi dilingkungannya. Memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri.

Untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kesadaran masyarakat kabupaten sumedang yang terkena dampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar baik secara fisik,mental, maupun sosial. Kemampuan fisik ini merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan aktiits sehari-hari bekerja,belajar dan aktivitas sosial. Kemampuan mntal adalah kemampuan yang diperlukan dalam berpikir krisis,memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Kebutuhan sosial adalah kemampuan yang diperlukan dalam komunikasi,berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang:

1. Masih kurangnya kemampuan sumber day manusia di Badan enanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sumedang. Dilihat dari belum adanya tenaga ahli di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- (BPBD) kabupaten Sumedang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Masih minimnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sumedang dalam program penyuluhan bencana. Dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang untuk menunjang program penyuluhan bencana, salah satunya alat untuk mengidentifikasi terjadinya bencana. Haal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan.
 3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat kabupaten Sumedang mencegah bahaya bencana. Hal ini bisa dilihat dari perilaku masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan dan pembakaran hutan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan

2. METHOD

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak serba pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan” tertentu Sugiyono (2020:54) artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka yang ada hubungannya dengan implementasi program penyuluhan bencana daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten Sumedang.

Dapun informan penelitian Implementasi Program Penyuluhan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1
2	Sekretaris	1
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
4	Pusat Data Logistik Operasi (PUSDALOP)	2
5	Jumlah	5

Teknik pengumpulan data menurut sugiyono (2020:63) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya diperoleh dari sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
3. Triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Apabila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber yang serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang berapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman penelitian terhadap apa yang ditemukan.

Sugiyono (2018) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Dependabilitas
4. Uji konfirmabilitas

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program harus diimplementasikan agar dampak atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan program. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari sebuah proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Wawancara bertitik tolak operasional variabel yaitu upaya upaya mengatasi hambatan implementasi program penanggulangan bencana dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di kabupaten Sumedang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Paul A Sabatier (Tachjan, 2006):

1. *Tractability of the problems*
2. *Ability of policy decision to structure implementation*
3. *Nonstatutory variabel affecting implementation*

Apabila dimensi-dimensi diatas terpenuhi, maka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang dikatakan baik dan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil keseluruhan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 3 Kesimpulan Implementasi Kebijakan Program Penyuluhan Bencana

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	<i>Tractability of the problems</i>	a. Kesukaran-kesukaran teknis	BPBD memiliki aplikasi khusus bernama SITABAH untuk penanganan bencana, yang tidak dimiliki kabupaten lain. Mereka berkolaborasi dengan kecamatan untuk mengatasi kendala teknis sosialisasi akibat anggaran terbatas. Penanggulangan bencana memerlukan pemahaman dari masyarakat juga, bukan hanya BPBD, meskipun ada kendala dalam sumber daya manusia dan alat evakuasi. Meskipun BPBD telah bekerja baik, mereka belum mencapai 100% efektivitas dan menghadapi masalah koordinasi internal.
		b. Keragaman perilaku kelompok sasaran	Meskipun pegawai terbatas, BPBD Kabupaten Sumedang efektif mengelola manajemen bencana dengan kesiapsiagaan dan koordinasi baik, serta bekerja sama dengan BASARNAS dan instansi lain. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, memiliki tanggung jawab bersama dalam mitigasi bencana. BPBD terus mengatasi tantangan dalam sosialisasi kesiapsiagaan dan beradaptasi dengan kondisi lokal. Setiap desa di Sumedang memiliki relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), termasuk di daerah rawan bencana

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		c. Presentase kelompok sasaran sebanding umlah penduduk	BPBD siap menangani 1-10 kejadian bencana per hari dengan sumber daya terbatas, mengandalkan pengetahuan, keterampilan, peralatan standar, dan pengalaman lapangan. Mereka menekankan bahwa tanggung jawab bencana adalah kolektif dan memerlukan dukungan masyarakat luas. BPBD mengikuti SOP dan peraturan untuk memastikan standar pelayanan dan penanganan yang jelas dan aman.
		d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan	BPBD melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan provinsi, serta memantau dan mengedukasi masyarakat untuk antisipasi bencana. Mereka bekerja sama dengan pemerintah setempat, pemangku adat, agama, RT, RW, dan relawan untuk meningkatkan kesadaran bencana. Respons masyarakat yang baik dan kerja sama mempermudah operasional BPBD, yang melaksanakan tugas di pusat operasi untuk menangani aspirasi masyarakat terkait daerah rawan bencana.
2.	<i>Ability of policy decision to structure implementation</i>	a. Kejelasan dan konsistensi tujuan	BPBD memantau dan mengevaluasi kejadian bencana secara konsisten setiap minggu. Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, seperti saat gempa akhir tahun lalu, dengan mendata kebutuhan dan mengajukan anggaran tak terduga. BPBD berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan lapangan, meski tanpa anggaran tertentu
		b. Ketepatan alokasi sumber dana	BPBD selalu berkoordinasi dan mendata daerah rawan bencana. Anggaran yang ada sudah tepat untuk kebutuhan kebencanaan, pencegahan, dan pemulihan, namun jika tidak cukup, BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait. BPBD Kabupaten Sumedang melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan tanpa anggaran, memaksimalkan pelayanan publik, dan menggunakan media sosial serta kunjungan lapangan untuk pengembangan

Implementasi Program Penyuluhan Bencana Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
3.	<i>Nonstatory variable affecting implementation</i>	a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi	BPBD mendapatkan dampak positif dari masyarakat, dengan peningkatan pelayanan bencana dan publikasi di media sosial. Mereka menggunakan aplikasi SI TABAH untuk memudahkan akses informasi bencana, meskipun belum sepenuhnya diakses. BPBD menyesuaikan layanan dengan karakteristik daerah dan fokus pada bencana paling rawan, serta memberikan himbauan terkait potensi bencana. Di Kabupaten Sumedang, BPBD melakukan sosialisasi dan memaksimalkan sumber daya untuk meninjau kondisi daerah, termasuk membuat himbauan peringatan dini dan petunjuk evakuasi.
		b. Dukungan Publik	Prioritas utama BPBD adalah kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dengan koordinasi dan dukungan atasan untuk rekomendasi kebijakan, meski tidak memiliki wewenang keputusan sendiri. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa menyelamatkan diri saat gempa. Dukungan dan antusiasme masyarakat sangat berarti, termasuk pembentukan relawan. Agenda prioritas BPBD tergantung situasi, dengan fokus utama pada himbauan dan peringatan untuk daerah rawan bencana.
		c. Dukungan dari pejabat atasan	BPBD menekankan koordinasi dengan atasan untuk efektivitas penanggulangan bencana, yang dinilai dari tingkat koordinasi yang baik. BPBD memerlukan SK tanggap darurat dari Bupati untuk membuat RAB dan mengajukan kebutuhan bencana. Pemerintah wajib mendukung penanggulangan bencana untuk mengantisipasi korban jiwa. BPBD bekerja sama dengan dinas terkait meskipun terbatas dalam memenuhi kebutuhan besar. Kebijakan dan wewenang BPBD Kabupaten Sumedang sudah jelas, dengan efektivitas tergantung pada koordinasi dan siaga bergantian.

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		d. Komitmen dan kemampuan	BPBD berkomitmen bekerja sama dengan instansi terkait, dinas, dan relawan untuk koordinasi efektif dalam mengantisipasi bencana. Mereka aktif mensosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat meskipun dengan anggaran terbatas. BPBD mengutamakan tindakan terukur dan meningkatkan kapasitas personil, dengan kesiapsiagaan 24 jam.

Sumber: Hasil Wawancara Informan Penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024

Berdasarkan tabel diatas, dalam implementasi kebijakan program penyuluhan bencana di kabupaten Sumedang, secara keseluruhan Implementasi kebijakan program penyuluhan bencana cukup baik. Menunjukkan adanya dimensi teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan program penyuluhan bencana menurut Mazmanian & Paul A Sabatier (Dr. H. Tachjan, 2006; 57-59) yaitu:

Dalam dimensi *Tractability of the problems*, Implementasi program penyuluhan bencana, belum cukup efektif dikarenakan Sumber daya manusia terbatas, serta kurangnya anggaran yang membuat BPBD harus bekerja sama dengan setiap instansi terkait. Meskipun pegawai terbatas, BPBD Kabupaten Sumedang efektif mengelola manajemen bencana dengan kesiapsiagaan dan koordinasi baik, serta bekerja sama dengan BASARNAS dan instansi lain. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha memiliki tanggung jawab bersama dalam mitigasi bencana.

BPBD terus mengatasi tantangan dalam sosialisasi kesiapsiagaan dan beradaptasi dengan kondisi lokal. Setiap desa di Sumedang memiliki relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), termasuk di daerah rawan bencana. *Tractability of the problems* dalam mengukur implementasi program merujuk sejauh mana suatu masalah dapat diselesaikan secara praktis menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia, seperti waktu dan memori. Ini penting untuk menyelesaikan masalah dari ukuran input.

Hal ini didukung oleh teori menurut Fred Glover dan Gary Kochenberger (2018) dalam buku mereka "*Handbook of Metaheuristics*," mereka menjelaskan bahwa: "beberapa masalah optimasi yang rumit dapat didekati dengan teknik metaheuristik, yang meskipun tidak selalu memberikan solusi optimal, dapat memberikan solusi yang cukup baik dalam waktu yang wajar". Dengan demikian, berdasarkan pendapat diatas maka terdapat keselarasan antara teori dengan kesimpulan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi *Tractability of the problems* dikatakan cukup baik

Dilihat dari dimensi *Ability of policy decision to structure* implementation dengan indikator Kejelasan dan Konsistensi Tujuan, BPBD memantau dan mengevaluasi kejadian bencana secara konsisten setiap minggu. Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, seperti saat gempa akhir tahun lalu, dengan mendafta kebutuhan dan mengajukan anggaran tak terduga.

BPBD berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan lapangan, meski tanpa anggaran tertentu Dan pada indikator Ketepatan Alokasi Sumber Dana, BPBD selalu berkoordinasi dan mendafta daerah rawan bencana. Anggaran yang ada sudah tepat untuk kebutuhan kebencanaan, pencegahan, dan pemulihan, namun jika tidak cukup, BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait.

Dalam dimensi *Nonstatutory variabel affecting implementation*. Mendapatkan dampak positif dari masyarakat, dengan peningkatan pelayanan bencana dan publikasi di media sosial. Mereka menggunakan aplikasi SI TABAH untuk memudahkan akses informasi bencana, meskipun belum sepenuhnya diakses. BPBD menyesuaikan layanan dengan karakteristik daerah dan fokus pada bencana paling rawan, serta memberikan himbauan terkait potensi bencana.

Di Kabupaten Sumedang, BPBD melakukan sosialisasi dan memaksimalkan sumber daya untuk meninjau kondisi daerah, termasuk membuat himbauan peringatan dini dan petunjuk evakuasi. Prioritas utama BPBD adalah kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dengan koordinasi dan dukungan atasan untuk rekomendasi kebijakan, meski tidak memiliki wewenang keputusan sendiri. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa menyelamatkan diri saat bencana. Dukungan dan antusiasme masyarakat sangat berarti, termasuk pembentukan relawan.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program penyuluhan bencana yaitu terdapat data-data yang belum terupdate sehingga menjadikan program penyuluhan bencana tidak tepat sasaran. Data-data daerah bencana yang disajikan dari pihak pusat justru tidak relevan dengan data dilapangan yang sesungguhnya. Kesadaran masyarakat dibutuhkan oleh pihak pemerintah yang mana seharusnya masyarakat tersebut sudah dikatakan mampu tetapi masih mau menerima bantuan tersebut.

Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang berusaha mengupayakan agar implementasi program penyuluhan bencana dalam rangka mengembangkan kemampuan dasar masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan dengan baik sesuai dengan target dan tujuannya.

4. CONCLUSION

Implementasi kebijakan program penyuluhan bencana di kabupaten Sumedang, secara keseluruhan Implementasi kebijakan program penyuluhan bencana cukup baik. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya Sumber daya manusia terbatas, serta kurangnya anggaran yang membuat BPBD harus bekerja sama dengan setiap instansi terkait. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran, Meskipun pegawai terbatas, BPBD Kabupaten Sumedang efektif mengelola manajemen bencana dengan kesiapsiagaan dan koordinasi baik, serta bekerja sama dengan BASARNAS dan instansi lain. BPBD memantau dan mengevaluasi kejadian bencana secara konsisten setiap minggu. Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, seperti saat gempa akhir tahun lalu, dengan mendaftarkan kebutuhan dan mengajukan anggaran tak terduga. Kondisi Sosisio-ekonomi dan teknologi BPBD mendapatkan dampak positif dari masyarakat, dengan peningkatan pelayanan bencana dan publikasi di media sosial. Mereka menggunakan aplikasi SI TABAH untuk memudahkan akses informasi bencana, meskipun belum sepenuhnya diakses. BPBD menyesuaikan layanan dengan karakteristik daerah dan fokus pada bencana paling rawan, serta 179 memberikan himbauan terkait potensi bencana. Di Kabupaten Sumedang, BPBD melakukan sosialisasi dan memaksimalkan sumber daya untuk meninjau kondisi daerah, termasuk membuat himbauan peringatan dini dan petunjuk evakuasi.

Hasil penelitian mengenai faktor penghambat dalam, hambatan-hambatan dalam meningkatkan implementasi program penyuluhan bencana di kabupaten Sumedang, dipicu oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan dana, serta kurangnya kesadaran tentang kebencanaan di masyarakat. Meskipun demikian, BPBD tetap aktif berkoordinasi dengan dinas terkait dan menjalankan tugas sesuai SOP, meskipun ada keterlambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu kurangnya loyalitas dan dedikasi serta kebijakan baru mengenai anggaran untuk bencana ekstrim. Meskipun BPBD sudah menangani laporan bencana sesuai tugasnya dan kinerjanya cukup baik, masih ada ketergantungan di masyarakat. Kesulitan evakuasi warga, kurangnya kesadaran lingkungan, dan aksesibilitas yang buruk, serta kurangnya dukungan teknologi dan peralatan di BPBD.

Upaya mengatasi hambatan implementasi penyuluhan bencana di Kabupaten Sumedang, secara keseluruhan upaya yang dilakukan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan implementasi program penyuluhan bencana dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dimensi isi kebijakan yaitu BPBD meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pertemuan rutin, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

REFERENCES

- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Cv. Pustaka Setia. Bungin, B. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Rajagrafindo. Erwan, D. (2015). Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta: Penerbit Gsvs Media. Gie, T. L. (2009). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media. Meleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Purwanto, E. A. (2015). Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi). Yogyakarta: Gava Media. Tachjan, D. H. (2006). Implementasi kebijakan publik. Bandung: AIPI Bandung. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. AlfabetaSyafi'i, Inu Kencana. (2006). Ilmu administrasi Publik, Jakarta: PT Asdi Mahasatya. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: CV. AlfabetaSyafi'i, Inu Kencana. (2006). Ilmu administrasi Publik, Jakarta: PT Asdi Mahasatya. Katri. (2022). Implementasi Program Elektronik Buku Register Kematian Kecamatan Situraja. Sumedang: Universitas Sebelas April. Sulthan. (2022). Implementasi Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Minat Berpolitik Generasi Muda Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten. Sumedang: Universitas Sebelas April. Wanda. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan Gapai Impian Dan Cita-cita. Sumedang: Universitas Sebelas April